

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

a. Pengertian

Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normatif ideal dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak) jadi empiric. Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Ilmu pemerintahan menurut Merriam (dalam Syafiie. 2005;22) mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan(baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik atau benar.

Menurut R. Mac Iver (dalam syafiie. 2005:22) Ilmu pemerintahan adalah sebuah tentang bagaimana manusia- manusia dapat diperintah, sedangkan pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Menurut D.G.A. Van Poelje (dalam syafiie 2005;21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan Menurut Musanef (dalam syafiie. 2007:32) ilmu pemerintahan dapat di definisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta meyelidiki unsur-unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara Dinas-Dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh Dinasitu atau;
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap Dinas Umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan dalam dan keluar atau;
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintah dan yang diperintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan pihak yang lain dan mengusahakan agar keserasian pendapat dan daya tindak yang efektif dan efesien dalam pemerintahan atau;
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan Dinas Umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut C.F. Strong(dalam syafiie 2005;22) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

b. Tugas-Tugas Pokok Pemerintahan

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara cara kekerasan;
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat yang dapat berlangsung secara damai;
3. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka;
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup (Rasyid 1997;13)

Dalam defenisi lain ilmu pemerintahan di artikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang Legislatif, Eksekutif, Dan Yudikatif hubungan usat yang di perintah Syafie (2009:23)

c. Fungsi Pemerintahan

Selanjutnya terdapat beberapa fungsi pemerintahan yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan

1. Fungsi pengaturan yang lazimnyadi kenal sebagai regulasi dengan segala bentuknya, di maksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tetap sehingga menjadi kondusifbagi berlangsungnya berbagai aktifitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat
2. Fungsi pelayanan akan membuatkan keadilan dalam masyarakat
3. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat
4. Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Rasyid dalam Muhaddam Labobo (2006:26)

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan dapat di definisikan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa –publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

d. Ruang Lingkup Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:7) Berdasarkan definisi itu dapat di kondisikan bahwa ruang lingkup pemerintahan terdiri dari :

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa public dan layanan-civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, Kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintahan
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu.

2. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan undang undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di maksud daerah adalah masyarakat hukum (yang di tentukan batas –batasnya), dan yang di maksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan, masyarakat melalui peningkatan otonomi luas, Daerah diharapkan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.

Menurut Undang - Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. sedangkan pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah pasal 208, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bantu oleh perangkat Daerah, kemudian dalam pasal 209 perangkat Daerah terdiri dari

1. Perangkat Daerah provinsi terdiri dari
 - a. Sekretariat daerah;
 - b. Secretariat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas; dan
 - e. Badan
2. Perangkat Dearah Kabupaten/Kota terdiri dari
 - a. Sekretariat Dearah;
 - b. Secretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan; dan
 - e. Kecamatan.

Kedudukan kecamatan di jelaskan pada pasal 221 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan;
2. Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di bentuk dengan peraturan Darah Kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah;
3. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten atau kota pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD

Kabupaten/kota,sebelum di tetapkan oleh Bupati/Walikota di sampaikan kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah menggunakan asas Desentralisasi,dekonsentrasi,dan Tugas pembantuan,sesuai dengan peraturan perundang - undangan diantara adalah:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan olh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas otonomi;
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemrintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,kepada instansi pertikal di wilayah tertentu,dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
- c. Tugas pembantuan adalah penguasaan dari pemerintah pusat kepada daaerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerinth Daerah provinsi kepada daerah kabupaten /kota untuk meleksanakan sebagian urusan pemeritah ayang menjadi kewenangan Dearah provinsi.

3. Peranan

a. Pengertian

Peranan menurut Soekanto (2001:269) adalah konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi ,peranan juga dapat di katakan sebagai prilaku individu yang paling penting bagi sturuktur masyarakat sosial.

Selanjutnya menurut Susanto (dalam Soekanto 2001:94) peran adalah dinaminasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun disebut status objektif. Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan.

b. Teori Peran

Menurut ndraha (2005 :53) peran di artikan sebagai suatu pelaku yang di harapkan atau di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator. Sehingga dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa peranan adalah kewajiban yang di miliki oleh individu atau organisasi dan dinharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

c. Unsur-unsur Peranan

Selanjutnya menurut Soerjono soekanto (2012: 441) unsur unsure peranan atau rule adalah :

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak dan kewajiban
3. perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian aktfitas yang di mainkan seseorang

4. Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita 2011:21),istilah pengelolaan samadengan manajemen yaitu mengerjakan,mengorganisasikan,dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara evektif material dan fasilitas utuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adi sasita (2011:22) mengemukakan bahwa,pegelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan,akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti prencanaan,pelaksanaan,dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien tata pelaksanaan pengelolaan kepariwisataan meliputi tuntunan kegiatan kerja sebagi berikut:

1. invertarisasi tata alam dan binaan,dan sekaligus mempelajari dampaknya;
2. Pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan;
3. Menetapkan tujuan dan sarana yang akan dicapai dalammasalah pengelolaan lingkungan.
4. mengindentifikasi tanggung jawab masing masing kelompok kerja pengelolaan.

Dalam mengelola/memanajemen pariwisata memerlukan keahlian dan pengalaman seperti yang dikemukakan oleh Salim (1982) bahwa berapapun banyaknya modal yang dimiliki, pembangunan tidak akan terlaksana kecuali disertai dengan sumberdaya managerial yang mampu mengelola modal itu untuk pembangunan (Hadiwijoyo, 2012: 57).

a. Perencanaan (Planning)

1. Tujuan Yang Akan Dicapai/ Visi

Yaitu pelestarian dan perlindungan flora dan fauna yang ada, mengenalkan dan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata, dan sebagai sumber pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

2. Prosedur Kerja/Misi

Yaitu dengan membangun sarana dan prasarana wisata dengan dibantu oleh masyarakat setempat kemudian mempromosikan kepada wisatawan melalui berbagai media.

3. Sasaran

Yaitu semua wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang/rekreasi dan tidak mencari uang selama di objek wisata.

4. Biaya

Biaya berasal dari pemerintah yang digunakan untuk pembuatan awal fasilitas wisata, pemeliharaan fasilitas wisata, pengembangan fasilitas wisata, dan termasuk untuk danapromosi objek wisata.

5. Rencana Pelaksanaan

Yaitu dengan menambahkan fasilitas penunjang di objek wisata seperti penampilan band/orgen lokal dan penambahan permainan anak-anak (komedi putar dan bianglala).

6. Tempat Pelaksanaan

Yaitu di kawasan danau betung

7. Pelaku Pelaksana

Yaitu semua karyawan yang telah ditunjuk oleh Kepala Bidang Kepariwisataan untuk memberikan masukan/ide dalam perencanaan.

b. Pengorganisasian

1. Kekuasaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepariwisataan dengan dibantu oleh 11 orang anggota.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan posisi masing-masing dalam struktur organisasi

3. Pelaporan

Laporan tentang masalah yang ada di objek wisata seperti masalah kebersihan dan kekurangan yang ada di objek wisata, jumlah wisatawan yang datang setiap minggu, kebersihan di Objek Wisata Danau Betung.

c. Pengarahan (Directing)

1. Mengarah Pada Tujuan

Yaitu pengarahan yang bersifat mengajak untuk menciptakan kesan yang positif tentang objek wisata. Kepada masyarakat setempat berupa pengaturan tata

letak untuk berjualan, menjaga kebersihan, tidak menebang pohon dan melakukan perburuan secara liar di lokasi objek wisata.

2. Memberikan Penerangan/Penjelasan Tentang Tujuan

Dengan memberikan penjelasan dengan tepat dan tidak dari tujuan perencanaan pengelolaan Objek Wisata danau betung

3. Mengadakan Koreksi Terhadap Kekurangan

Koreksi yang dilakukan oleh atasan yaitu dengan meminta laporan mingguan kepada kepala seksi masing-masing dan menilai langsung kinerja anggota masing-masing untuk dilaporkan kepada Kepala Bidang Kepariwisata.

d. Pengawasan (Controlling)

1. Supervisi

Pengawasan di objek wisata dilakukan langsung oleh petugas kebersihan dan keamanan sedangkan pengawasan kinerja petugas dilakukan oleh Kepala Seksi Usaha Jasa, Pengembangan Sarana Wisata.

2. Perbandingan

Membandingkan dengan objek wisata yang lain namun pengelola menyadari masih banyak kekurangan dari Objek Wisata danau betung dan untuk ke depannya akan dilakukan perbaikan.

3. Tindakan Korektif

Mengadakan pertemuan dengan semua anggota organisasi, dengan membahas masalah dan kekurangan dalam mengelola Objek Wisata danau betung Kemudian mengoreksi langsung pekerjaan setiap anggota dan memberikan solusi jika ada masalah yang dihadapi anggotanya dalam melaksanakan pekerjaan.

5. Strengths Weakness Opportunities Threats (SWOT)

a. Pengertian

Analisis SWOT merupakan salah satu metode mengembangkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar yaitu strengths, weakness, opportunities dan threats, metode ini paling sering di gunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan di lakukan analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan hanya memecahkan masalah (freddy, 2014).

b. Analisis SWOT Dalam Pengelolaan Objek Wisata

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor yaitu:

- a. Kekuatan (Strengths) Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada, kekuatan yang di analisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek konsep bisnis itu sendiri, yaitu kekuatan apa saja yang dimiliki pariwisata, dengan mengetahui kekuatan, pariwisata dapat di kembangkan menjadi lebih tangguh hingga mampu bertahan dalam pasara dan mampu bersaing untuk perkembangan selanjunya yang menyangkut pariwisata. Misalnya kekuatan keuangan, motivasi anggota yang kuat, nama baik organisasi terkenal, memiliki pengetahuan dan keterampilan. yang lebih, anggota yng pekerja keras, dan memiliki organisasi yang luas.
- b. Kelemahan (Weakness) Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada, kelemahan yang di

analisi, merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi pengembangan objek wisata misalnya, kekurangan dan memiliki anggota yang belum terampil, belum memiliki pengetahuan yang cukup, dan anggota kurang kreatif.

- c. Peluang (Opportunities) Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi, kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis, itu sendiri misalnya kompetitor, kebijakan misalnya, kebutuhan lingkungan sesuai dengan tujuan organisasi, masyarakat butuh perubahan, tingkat kepercayaan masyarakat yang bagus, belum ada organisasi lain yang melihat peluang tersebut
- d. Ancaman (Threats) Merupakan kondisi yang mengancam dari luar Ancaman ini dapat dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. misalnya, masyarakat dalam kondisi apatis, kegiatan organisasi itu banyak dilakukan organisasi lain, dan isu yang sudah basi

Menurut Santono (2001) dalam Anjela (2014) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang diharapkan dapat memecahkan suatu masalah analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*stength*), dan peluang (*opportunities*), namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (*weakesses*) dan ancaman (*threats*) Selain itu menurut Sthepen (1999) dalam Murdani (2014) Analisis SWOT merupakan suatu analisis yang berdasarkan pada kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*Opportunities*), kesempatan serta Ancaman

(*threat*). Analisis SWOT di lakukan dengan maksud mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang di lakukan untuk mencapai sasaran yang telah di tetapkan. Oleh karena tingkat kesiapan fungsi di tentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan pada keseluruhan faktor dalam setiap fungsi tersebut, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal. Untuk tingkat kesiapan yang memadai, artinya: minimal memenuhi ukuran kesiapan yang di perlukan untuk mencapai sasaran, di nyatakan sebagai kekuatan bagi faktor yang tergolong internal dan peluang bagi faktor yang tergolong eksternal, sedangkan tingkat kesiapan yang kurang memadai, artinya tidak memenuhi ukuran kesiapan, di nyatakan sebagai ukuran kelemahan bagi faktor yang tergolong internal atau ancaman bagi faktor yang tergolong eksternal (Wilis, 2013).

Analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategi yang klasik dengan mengunkakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan suatu strategi (freddy: 2014).

6. Pariwisata

a. Pengertian

Pariwisata adalah suatu jenis industry yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor sektor produktifitas lainnya. Pendit (2006:32)

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang di lakukan untuk sementara waktu, yang di selenggarakan dari satu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan

untuk berusaha (Business) atau mencari nafkah di tempat yang di kunjungi, tetapi semata mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan

b. Konsep Pengelolaan Pariwisata

Didalam pengelolaan pariwisata terdapat beberapa fasilitas. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang mendukung obyek wisata untuk mengakomodasikan segala kebutuhan wisatawan, tidak secara langsung mendorong pertumbuhan tetapi berkembang pada saat yang sama atau sesudah atraksi berkembang

Berdasarkan Spilliane dalam Muklas (2008: 10) fasilitas di kelompokkan menjadi tiga bagian yang meliputi :

1. Fasilitas Umum

Merupakan sarana yang di butuhkan dan di rasa sangat perlu selama pengunjung berada di suatu obyek wisata, fasilitas utama seperti:

- Areal utama yang terbagi atas kebersihan
- Tampilan fisik dan luar areal
- Kendaraan yang terdiri dari keamanan
- Penyampaian kegunaan dan tampilan fisik

2. Fasilitas pendukung

Merupakan sarana yang ada proporsinya sebagai pelengkap fasilitas utama sebagai wisatawan akan lebih betah, yang terdiri dari :

- Taman
- Musollah
- Wc umum

- Gazebo dan Hiburan

3. Fasilitas penunjang

Pada dasarnya merupakan sarana yang bersifat sebagai pelengkap utama sehingga wisatawan terpenuhi apapun kebutuhan selama mengunjungi tempat tersebut, sarana penunjang fasilitas itu meliputi :

- Pos keamanan
- Pos penjualan tiket
- Pelayanan yang di berikan

7. Obyek wisata

a. Pengertian

Obyek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik orang orang agar mau berkunjung ke tempat tersebut Obyek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang di bangun dan di kembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan di usahakan sebagai tempat yang di kunjungi wisatawan.

Menurut SK MENPARPOSTEL No: KM.98/PW.102/MPPT-87, objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Suatu kawasan atau daerah agar bisa di katakan obyek wisata harus memenuhi hal pokok berikut :

- a) Sesuatu yang menarik untuk di lihat
- b) Sesuatu yang manarik dan khas untuk di beli
- c) Sesuatu aktifitas yang dapat yang dapat di lakukan di tempat itu

b. Bentuk-Bentuk Objek Wisata

Bisa di katakan obyek wisata paling tidak memenuhi beberapa unsure pokok yang mendukung suatu kawasan atau daerah untuk di kunjungi wisatawan. Obyek wisata bisa berupa wisata alam seperti Gunung, Laut, Pantai, Danau , Sungai, atau berupa obyek pembangunan seperti Museum, Benteng, Situs peninggalan, Sejarah dan lain lain.

B. Penelitian Terdahulu

Peneiltian mengenai peranan dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga dalam pengelolaan objek wisata sudah banyak di lakukan, untuk itu penulis merujuk ke beberapa peneliti sebelumnya sebagai pedoman pembanding dengan penelitian yang akan penulis laksanakan .adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Tahun	Judul
1	2	3	4
1	Riski NPM : 097310103	2014	Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota pekanbaru dalam mempromosikan objek wisata belanja pasar bawah
2	Riyadi Shaleh NPM : 137310358	2017	Peranan dinas pariwisata,kebudayaan, pemuda,dan olahraga kabupaten bengkalis dalam melestarikan kesenian tradisional bengkalis

1	2	3	4
3	Rasdalina NPM : 127310659	2016	Peranan dinas pariwisata pemuda dan olahraga dalam mengembangkan objek wisata desa bokor kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan meranti

Berdasarkan tabel penelitian Terdahulu di atas banyak perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan penulis kaji atau teliti yaitu mengenai Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Objek Wisata Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan) maka penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaan seperti lokasi dilaksanakannya penelitian .tempat yang di gunakan untuk penelitian tahun penelitian juga begitu jauh perbedaanya kemudian banyak nya perbeda-perbedaan pada fenomena penelitian begitu juga berbedanya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian tersebut perbedaan pada penulisan operational variabel populasi dan sampel yang berbeda jadi penelitian yang di lakukan penulis sangat jauh berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian mengenai Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan Objek Wisata (Studi Pada Objek Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan), sebagai mana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Pada Objek Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan



<p>Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan</p>

Sumber: Modifikasi penulis, Tahun 2017

D. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami, konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisa dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan peneliti dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep –konsep tersebut antara lain.

1. Peranan yang dimaksud peneliti di sini ialah bagaimana seharusnya pihak Dinas Pariwisata sebisa mungkin berperan aktif serta ikut serta dalam megawasi ataupun mengembangkan objek wisata yang ada di daerah tersebut.
2. Pengelolaan pariwisata dalam penelitian ini yaitu kegiatan pariwisata dalam bentuk perawatan yang didalamnya meliputi masalah transportasi, restorasi, dan akomodasi, serta pengelolaan objek dan daya tarik wisata baik tata alam maupun tata budaya masyarakatnya, termasuk didalam keduanya yaitu unsur untuk pariwisata.
3. Keparawisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggara parawisata.

4. Objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan ,Olahraga Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat pribadi individu . Ada dua hal yang termasuk dalam peranan yang bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responsability) dan otoritas (authority) Girot dalam rauf (2005:16)	Peranan dinas kebudayaan, para wisata, pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan objek wisata (studi pada objek Danau Betung kecamatan pangkalan kuras kabupaten Pelalawan).	1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	a. Tujuan yang akan di capai/visi b. Prosedur kerja/misi c. Sasaran	Ordinal
		2. Pengorganisa sian (<i>Organizing</i>)	a. Kekuasaan b. Tugas dan tanggungjawab c. pelaporan	Ordinal
		3. Pengarahan (<i>Directing</i>)	a. mengarah pada tujuan b. memberikan penerangan atau penjelasan tentang tujuan c. mengadakan koreksi terhadap kekurangan	Ordinal
		4. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	a. Supervisi b. Perbandingan	Ordinal

		5. Kekuatan (strengths)	<ul style="list-style-type: none"> c. Tindakan korektif a. Kekuatan keuangan b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan c. Anggota yang pekerja keras 	Ordinal
		6. kelemahan (weakness)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kekurangan dana b. Orang orang belum terampil c. Anggota kurang kreatif 	Ordinal
		7. oppurtunities (peluang)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan lingkungan sesuai kebutuhan organisasi 	Ordinal

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1	2	3	4	5
		8. Ancaman (threats)	b. Masyarakat membutuhkan perubahan c. Tingkat kepercayaan a. Kondisi masyarakat apatis b. Lagi banyak di lakukan c. Isu yang di bawah sudah basi	Ordinal

Sumber: Modifikasi Penulis, 2017

F. Teknik Pengukuran

Dalam rangka menjawab tujuan penelitian ini maka perlu ditetapkan pengukuran baik untuk variabel maupun indikator variabel pengukuran terhadap pelaksanaan variabel di klasifikasikan dengan berperan, cukup berperan, tidak berperan. Untuk mengarahkan analisis data uraian dari masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Adapun untuk ukuran Peranan Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengawasan Objek Wisata (Studi Pada Objek Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan) untuk mendapatkan hasil konversi data responden maka peneliti merumuskan analisis Sekala Likert, Sugiyono (2017;25) Sekala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yaitu, penilaian dilakukan pengelompokan menjadi lima karteria yaitu: Sangat Berperan, Berperan, Cukup Berperan, Kurang Berperan, Tidak Berperan sebagai berikut.

Sangat Berperan : Apabila semua indikator Peranan Dinas Kebudayaan,Parawisata,Pemuda,dan Olahraga Dalam pengelolaan Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)mengatakan sangat baik maka berkisar antara 80-100%

Berperan : Apabila semua indikator Peranan Dinas Kebudayaan,Parawisata,Pemuda,dan Olahraga Dalam pengelolaan Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan) mengatakan baik maka berkisar antara 61-81%

Cukup Berperan : Apabila semua indikator Peranan Dinas Kebudayaan,Parawisata, Pemuda dan Olahraga Dalam pengelolaan Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)mengatakan cukup baik maka berkisar antara 41-60 %

Kurang Berperan :Apabila semua indikator Peranan Dinas Kebudayaan,Parawisata,Pemuda,dan Olahraga Dalam pengelolaan Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan)mengatakan tidak baik maka berkisar antara21-40%

Tidak Berperan : Apabila semua indikator Peranan Dinas Kebudayaan,Parawisata,Pemuda,dan Olahraga Dalam pengelolaan Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)mengatakan sangat tidak baik maka berkisar antara 0-20%.

